

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Pengujian untuk mengetahui adanya *legislative size*, *government size*, dan *capital expenditure* terhadap tingkat pengungkapan LKPD dengan moderasi dari opini audit menjadi pengujian pada penelitian ini. Sampel yang digunakan yaitu LKPD dari kabupaten atau kota di Indonesia tahun periode 2020. Dapat diketahui dari penelitian ini memperoleh hasil yang pertama ialah *legislative size* yang diukur menggunakan jumlah dari anggota masing-masing daerah. Hasil diperoleh bahwa banyak sedikitnya jumlah anggota DPRD sebagai pihak legislatif tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Kedua, pada penelitian ini *government size* diproksikan dengan total aset pada suatu daerah. Hasil yang menunjukkan bahwa *government size* memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal tersebut menandakan bahwa besar atau kecilnya total aset suatu daerah akan memberikan pengaruh pada tingkat pengungkapan LKPD

Ketiga, *capital expenditure* pada penelitian ini diukur dengan membandingkan total belanja modal dengan total modal pada suatu daerah. Dapat diketahui, penelitian ini *capital expenditure* menunjukkan hasil yang dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan LKPD, sehingga *capital expenditure* yang besar atau kecil akan mempengaruhi tingkat pengungkapan LKPD.

Keempat, opini audit yang digunakan sebagai moderasi pada penelitian ini tidak dapat memoderasi pengaruh *legislative size* terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal tersebut terjadi karena kurangnya tekanan atau motivasi dari DPRD yang berperan sebagai prinsipal, perwakilan dari masyarakat dalam mengawasi kegiatan pemerintah daerah menyebabkan tingkat pengungkapan LKPD oleh pemerintah tersebut menjadi turun merupakan penyebab.

Kelima, opini audit sebagai variabel moderasi dapat memoderasi pengaruh *government size* terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Alasannya ialah dengan adanya opini audit yang memiliki nilai yang baik akan menaikkan ukuran pemerintah suatu daerah yang diukur melalui jumlah aset sehingga akan diikuti dengan adanya penurunan tingkat pengungkapan LKPD.

Keenam, opini audit sebagai variable moderasi tidak dapat memoderasi pengaruh *capital expenditure* terhadap tingkat pengungkapan LKPD, karena tingginya hasil dari opini audit pada LKPD tidak memberikan tekanan yang tinggi pada pemerintah untuk membesarkan penggunaan belanja modal suatu daerah yang kemudian diungkapkan LKPD.

5.2 SARAN

Adapun saran yang dapat peneliti ungkapkan pada penelitian ini untuk dijadikan referensi yang selanjutnya ialah sebagai berikut:

- a. Bagi pemerintah daerah, terutama kabupaten atau kota diharapkan hasil dari penelitian ini mampu lebih mengoptimalkan pengungkapan LKPD yang sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010. Dengan bantuan adanya teknologi yang semakin canggih akan membantu pemerintah daerah untuk melakukan transparansi atas informasi yang dapat diakses dengan mudah.
- b. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan untuk menambahkan variabel independent baru selain yang tercantum pada penelitian ini, terkait tingkat pengungkapan LKPD seperti kekayaan pemerintah daerah atau *capital budget* agar memberikan pengetahuan yang lebih baru lagi.
- c. Bagi penelitian selanjutnya juga dapat melakukan penelitian dengan LKPD yang sudah di audit paling terbaru yaitu LKPD tahun 2021 dengan mengambil fenomena dari IHPS tahun 2022
- d. Selanjutnya untuk penelitian kedepannya dapat menggunakan sampel LKPD lebih dari satu periode dan memasukkan sampel LKPD provinsi.